

## DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep, 2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Penerbit Visi Media.
- Mardiasmo. 2007. Perpajakan (Edisi Ketiga). Jakarta: Penerbit Andi.
- Magdalena JS. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No. 28 tahun 2008 sebuah kajian interpretive pada Kantor Dinas Kehutanan dan Kebudayaan. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Novayanti. Debora. 2012. Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. 2015. Renstra Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Payakumbuh.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.10/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak..
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

Rosdiana, Irianto, 2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks

Tamjiddin. 2013. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemoda Olahraga Kota Banjar Baru. Jurnal kindai Vol 8. Makasar. 22 hal.

Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Edisi Satu. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<http://repository.usu.ac.id>

<http://repository.unand.ac.id>